



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bahas cepat RUU TPKS
Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

KOMPAS, RABU, 19 JANUARI 2022

Umum | 15

Bahas Cepat RUU TPKS

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Hanya satu dari sembilan fraksi di DPR yang tidak menyetujui RUU TPKS.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disetujui atau RUU TPKS menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan RUU itu diharapkan bisa dilakukan dengan cepat. Ada harapan, RUU itu sudah bisa disahkan jadi UU pada pertengahan 2022.

Keputusan mengenai persetujuan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022), di Jakarta. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya satu fraksi yang menyatakan tak setuju terhadap RUU TPKS, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya, yang juga Ketua Panitia Kerja RUU TPKS, mengatakan, dukungan delapan fraksi itu menjadi modal politik kuat bagi DPR dalam membahas RUU TPKS.

Willy berharap RUU TPKS bisa kembali dibahas di Baleg DPR. Berdasarkan pembicaraan informal dengan Badan Musyawarah DPR, idealnya RUU ini dibahas kembali di alat kelengkapan dewan pengusul, yakni Baleg DPR. Namun, keputusan akhir akan ditentukan Basuki setelah mendapatkan surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama menteri untuk membahas RUU itu bersama DPR.

Seusai rapat paripurna, kata Willy, DPR akan mengirim hasilnya kepada Presiden Joko Widodo agar segera diterbitkan surpres dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Presiden diharapkan mempercepat pengiriman surpres dan DIM karena DPR dan pemerintah sama-sama berkomitmen kuat ingin segera mengesahkan RUU TPKS.

Alasan PKS menolak

Perwakilan Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengatakan, PKS menolak RUU itu bukan karena tak setuju ada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. "Melainkan karena RUU TPKS itu dinilai tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana keseksualan yang meliputi kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual, yang menurut kami menjadi esensi penting bagi pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual," katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili Neng Eem Marhamah menilai, ada sejumlah urgensi percepatan pengesahan RUU TPKS. Secara filosofis dan teologis, kekerasan seksual bertentangan dengan tauhid. Kekerasan seksual juga diharamkan semua agama. Oleh sebab itu, katanya, negara harus hadir

mula dari pencegahan, proses hukum, hingga pemulihan korban. Namun, perumusannya harus dilakukan hati-hati agar tak terjadi kriminalisasi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyatakan, penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR sudah lama dimantikan, terutama oleh korban kekerasan seksual. Karena itu, keputusan Rapat Paripurna DPR soal RUU TPKS sangat berarti bagi korban kekerasan seksual. Untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS, Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait melalui Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU TPKS.

Novitasari dari Forum Pengada Layanan bagi perempuan korban kekerasan mendorong DPR membahas RUU TPKS dengan cepat agar setidaknya pertengahan 2022, RUU TPKS sudah disahkan jadi UU. "Proses pembahasan harus dilakukan terbuka, melibatkan peran serta masyarakat, khususnya lembaga layanan, penyintas, dan keluarga korban, mengingat ada beberapa hal krusial yang belum terakomodasi dalam draf yang dikeluarkan DPR tanggal 8 Desember 2021," ujarnya.

(REK/SYA/SON)